

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meningkatnya permintaan publik untuk pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui akuntabilitas media yang dilakukan secara berkala dalam bentuk laporan keuangan. (Yuliarta, 2013)

Standar akuntansi pemerintah dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan pasal 184 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintahan. (PP No.24,2005)

Adapun karakteristik kuantitatif Laporan Keuangan Pemerintah yang sebagaimana disebutkan dalam rerangka konseptual Akuntansi pemerintah (Peraturan Pemerintah) Nomor 24 Tahun 2005 antara lain : (1). Relevan, (2). Andal ,(3), dapat dibandingkan, dan (4), dapat dipahami (Huna,2013). Pada lampiran II SAP (Paragraf 33-37) telah dijelaskan bahwa laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan masa depan. Andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material,menyajikan setiap fakta secara jujur ,serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dengan periode sebelumnya dan Dapat dipahami oleh penggunanya (Sari dan Setiawati,2014)

Laporan Keuangan Pemerintah setiap tahun mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar Dengan pengecualian (WDP). Opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan Menolak memberi opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Ihsanti,2014).

Salah satu bentuk keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangannya dapat dinilai dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dihasilkan. Laporan tersebut harus berkualitas, artinya laporan yang dihasilkan Pemerintah Daerah bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Namun kenyataannya, perkembangan kualitas LKPD Kabupaten Purbalingga belum seperti yang diharapkan, hal ini terlihat dari opini “Wajar Dengan Pengecualian” yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2015.(bpk.go.id)

Penyusunan Laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan SDM yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah. Menurut Ihsanti (2014) kompetensi SDM adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. SDM merupakan faktor penting demi tercapainya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini adanya kompetensi SDM mendasari seorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati dkk,2014).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) harus bermanfaat sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Nurillah,2014). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan,pengendalian, dan pengambilan keputusan (Husna,2013).

Faktanya hasil pemeriksaan atas 355 obyek pemeriksaan pada PEMDA, BUMD dan BULD mengungkapkan 3.294 temuan yang memuat 4.234 permasalahan senilai Rp.2,08 triliun. Permasalahn tersebut meliputi 625 kelemahan sistem pengendalian intern, 1.273 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,dan 2.336 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan asset atau menyeter ke kas negara/perusahaan senilai Rp.48,01 milyar. Hasil pemeriksaan pada PEMDA,BUMD,dan BLUD disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.

Hasil Pemeriksaan Pada Pemerintah Daerah Dan BUMD

KETERANGAN	HASIL PEMERIKSA KEUANGAN		HASIL PEMERIKSA KINERJA		HASIL PEMERIKSA DTT		TOTAL	
	permasalahan	nilai	permasalahan	nilai	permasalahan	nilai	permasalahan	nilai
	n	(Rp.juta)	n	(Rp.juta)	han	nilai (Rp.juta)	n	(Rp.juta)
. Kelemahan SPI								
SPI	63	0	0	0	562	0	625	0
. Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan :								
. Kerugian	25	3.978.11	2	1.12	529	203.569,94	556	207.559,25
. Potensi Kerugian	0	0	0	0	205	1.717.955,15	205	1.717.955,15
Kekurangan Penerimaan	5	1.028.44	2	1.637,24	214	122.840,61	221	125.506,29
Sub Total 1 (Berdampak Finansial)	30	5.006,55	4	1.648,44	948	2.044.365,70	982	2.051.020,69
. Penyimpangan								
Administrasi	16	0	0	0	275	0	291	0
. Ketidakhematan	0	0	1	1.602,27	40	25.478,71	41	27.080,98
. Ketidakefisienan	0	0	6	0	0	0	6	0
. Ketidakefektifan	0	0	2.254	524,68	35	7.476,72	2.289	8.001,40
Sub Total 2	109	5.006,55	2.265	3.775,39	1860	2.077.321,13	4.234	2.086.103,07
Nilai Penyerahan Aset/Penyetoran Ke Kas	1.403,80		631,37		45.979,95		48.015,12	
Jumlah Temuan	76		2.008		1.210		3.294	
Jumlah Rekomendasi	165		5.848		3.577		9.59	
Jumlah LHP	5		205		145		335	

Sumber : www.bpk.go.id-IHPS II Tahun 2017

Pemilihan ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dikarenakan pada tahun 2014 BPK RI memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian”, pada tahun 2015 BPK RI masih memberi opini “Wajar Dengan Pengecualian” selanjutnya pada tahun 2016 BPK RI memberikan

pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” dalam menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Meskipun opini yang diberikan BPK tersebut baik pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, namun dari pelaksanaan pemeriksaan di lapangan, BPK masih menemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan temuan yang terkait dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Seperti diketahui, opini merupakan keluaran dari sebuah proses pemeriksaan laporan keuangan. Opini BPK merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mendapatkan tingkat kepercayaan atas sebuah laporan keuangan yang disajikan (Kinarayanti dan Erawati,2016).

Salah satu faktor penentu lainnya adalah pemanfaatan teknologi informasi akuntansi. Teknologi Informasi Akuntansi (TIA) merupakan teknologi yang digunakan dalam proses mengolah hingga menyampaikan informasi akuntansi. Selain itu teknologi berperan sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan bisnis pada berbagai fungsi manajerial sehingga perusahaan dapat memiliki daya saing di pasar. Disamping itu pihak manajemen dan pegawai pemerintah juga memerlukan informasi laporan keuangan untuk mengetahui, mengawasi dan mengambil keputusan-keputusan untuk menjalankan perusahaan / organisasi suatu institusi. Guna memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar maupun dalam perusahaan, disusun suatu sistem akuntansi. Sistem ini direncanakan untuk menghasilkan informasi yang

berguna bagi pihak luar maupun pihak dalam institusi / organisasi. Sistem akuntansi yang disusun untuk suatu lembaga institusi dapat diproses secara manual (tanpa mesin-mesin pembantu) atau diproses menggunakan mesin-mesin mulai dari mesin pembukuan yang sederhana sampai komputer. (Budiarti,dkk 2015).

Salah satu faktor penentu lainnya adalah pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang berkualitas tentu diperlukan prosedur pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan pelaporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah secara optimal untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan. Implementasi sejumlah perangkat perundang-undangan dibidang pemerintahan belum bisa dijadikan acuan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan pengelolaan keuangan daerah dan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah serta manajemen dalam kaitanya dengan pelayanan publik.(Defitri,2018).

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian diatas telah dilakukan oleh Nurillah (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kiranayanti& Erawati (2016) menemukan hasil bahwa kapasitas SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Utama (2017) juga menemukan hasil bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif

terhadap kualitas laporan keuangan. Namun Syarifudin (2014) mengungkapkan hal berbeda, yakni SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian karmila dkk (2013) menyatakan kapasitas SDM tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian Kalumata dkk(2016) menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun penelitian Budiarti dkk (2015) menemukan bahwa kompetensi SDM berpengaruh negatif terhadap kinerja pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian Fadhilah Husna (2013) juga mengungkapkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Ponamon (2014) menyatakan pengaruh kompetensi SDM berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi yang dilakukan oleh Budiarti dkk(2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pelaporan keuangan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Ariesta(2013) yang menyatakan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Fitriyanti (2015) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap

kinerja keuangan pemerintah. Namun penelitian Tampaty dkk(2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Diani(2014) yang menyatakan bahwa kapasitas pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Nagor dkk (2015) menyatakan prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Ovita dan Husaini (2013) menyatakan implementasi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dilingkungan sekretariat KPU Se-Bengkulu. Hasil penelitian Sholikhah (2016) juga menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun penelitian yang dilakukan Defitri (2018) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Andini dan Yusrawati(2015) dengan menggunakan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel dan lokasi penelitian. Lokasi Penelitian terdahulu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Purbalingga dengan mengambil sampel pada pegawai struktural dan pegawai yang memiliki peran dalam proses penyusunan laporan keuangan di 27 SKPD. Serta peneliti mengganti variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan daerah menjadi Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, karena Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi pada penelitian yang sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten begitupula peneliti menambahkan variabel Pengelolaan Keuangan daerah karena variabel ini masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Alasan peneliti mengambil populasi di Kabupaten Purbalingga karena Kabupaten Purbalingga berdasarkan laporan hasil evaluasi laporan keuangan daerah pada tahun 2016 mendapat capaian tertinggi dalam akuntansi pelaporan keuangan pemerintah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Akan tetapi pada tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Purbalingga Mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuangannya.(bpk.go.id)

Penelitian ini penting dilakukan karena supaya pemerintah kabupaten Purbalingga dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan agar pemerintah kabupaten Purbalingga bisa selalu konsisten mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti diantaranya :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?
3. Apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud dalam skripsi ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan untuk membahas pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Penelitian ini dilakukan di pusat pemerintahan Kabupaten Purbalingga, RSUD dan Dinas.

3. Penelitian ini dilakukan hanya pada pegawai pemerintahan Kabupaten Purbalingga.

1.4.1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah
2. untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta akan memberikan pengalaman dalam pengembangan kemampuan ilmiah khususnya pada penelitian tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2. Bagi Akademisi

Memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan perimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bidang teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna mengembangkan literature ilmu akuntansi

4. Bagi Pemerintah daerah

Memberikan masukan yang berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

